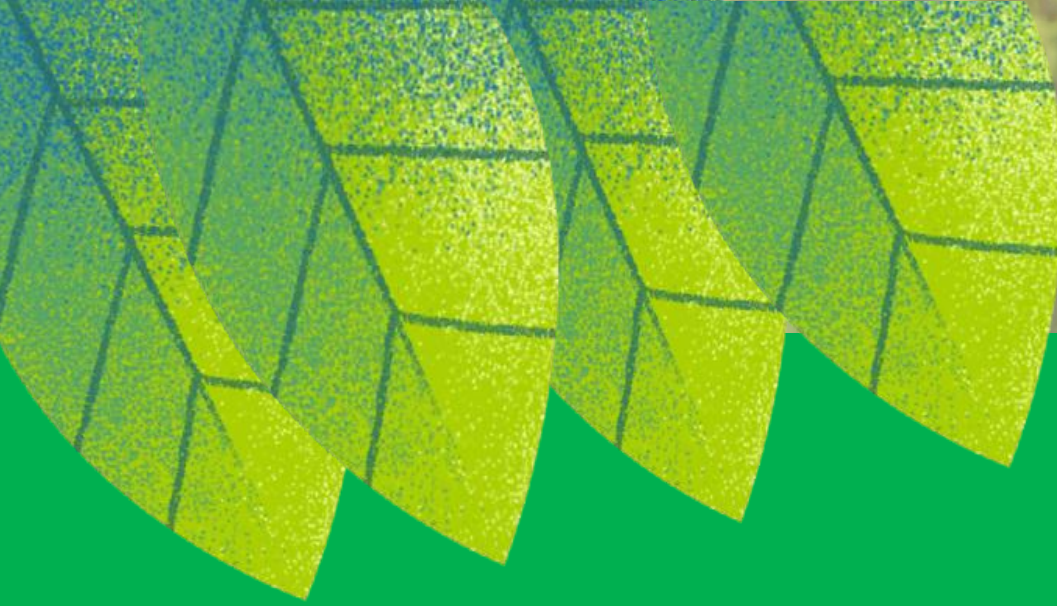




LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

TAHUN 2022

Alamat : Jl. Lawu No. 204, Kab.Karanganyar 57716

Email : dlh@karanganyarkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT-Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas ridho dan petunjuk-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2022.

Laporan Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 disusun sebagai manifestasi pertanggungjawaban Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Laporan ini berisi tentang pelaksanaan program kerja yang meliputi pelaksanaan kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan daerah bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2022.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 ini masih banyak terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan. Untuk itu kami mohon saran dan kritik demi peningkatan, kemajuan dan perbaikan baik dalam hal teknis penyusunan maupun materi pelaporan yang terkandung di dalamnya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada segenap pihak yang telah bekerjasama dan membantu atas penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 ini. Semoga bermanfaat.

Karanganyar, Januari 2023
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KARANGANYAR

BAMBANG DJATMIKO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19711223 199003 1 001

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	1
C. Maksud dan Tujuan	2
BAB II DESKRIPSI SKPD	
A. Visi dan Misi	3
B. Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
C. Jumlah Program Nasional yang Dilaksanakan Perangkat Daerah.....	4
D. Standard Operasional Procedure (SOP) Perangkat Daerah	5
E. Perda/Perbup yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	8
F. Struktur Organisasi.....	9
G. Kepegawaian.....	11
BAB III CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	
A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar.....	19
B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar.....	19
C. Urusan Pilihan	
1. Kehutanan.....	23
D. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang.....	24
BAB IV HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	
A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25
B. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.....	33
C. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.....	34
D. Urusan Pemerintahan Pilihan.....	43
E. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan.....	43
F. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan.....	43
G. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan.....	43
H. Unsur Kewilayahan.....	43
I. Unsur Pemerintahan Umum.....	43
J. Unsur Kekhususan.....	43
BAB V CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	
A. Tugas Yang Diterima dari Pemerintah Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten.....	44
B. Tugas Yang Diterima dari Pemerintah Provinsi yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.....	44
C. Tugas Pembantuan yang Diberikan Kepada Desa.....	44

BAB VI	PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	
	A. Urusan Lingkungan Hidup.....	45
BAB VII	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	46
	B. Saran	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dinas Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang secara langsung menangani sektor lingkungan hidup dalam hal ini berkewajiban menyajikan Laporan Pelaksanaan Tugas Unit Kerja Tahun 2022 yang menjelaskan pelaksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran sebagai manifestasi pertanggungjawaban Kepala Dinas Lingkungan Hidup sesuai Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dijabarkan dalam program kerja selama satu tahun anggaran perlu dilaporkan dan dievaluasi untuk menilai kinerja Organisasi Perangkat Daerah. Pelaksanaan program kerja meliputi pelaksanaan kegiatan rutin dan pembangunan daerah yang memuat data kuantitatif serta informasi yang dirangkum dari kegiatan pembangunan bidang lingkungan hidup di Kabupaten Karanganyar.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum untuk penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2022 adalah :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 8);

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 16);
- d. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 71 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 64 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
- e. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 91);
- f. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 107);
- g. Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 89).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Kepala Unit Kerja merupakan laporan pencapaian program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar yang didasarkan pada Rencana Kerja Tahunan Tahun 2022.

Tujuan penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas ini untuk mengkomunikasikan pencapaian indikator tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta program kegiatan untuk mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan program kerja selama 1 (satu) tahun anggaran.

BAB II

DESKRIPSI PERANGKAT DAERAH

A. VISI DAN MISI

Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar merupakan implementasi teknis lingkungan hidup dari visi dan misi Bupati Karanganyar yang tertuang dalam Visi Pembangunan Kabupaten Karanganyar Periode Tahun 2018-2023, yaitu :

“BERJUANG BERSAMA MEMAJUKAN KARANGANYAR”

Dengan Misi Pembangunan Kabupaten Karanganyar 2018-2023 :

1. Pembangunan infrastruktur menyeluruh
2. Pemberdayaan Perekonomian Rakyat
3. Pendidikan gratis SD/SMP dan kesehatan gratis
4. Pembangunan desa sebagai pusat pertumbuhan
5. Peningkatan kualitas keagamaan, sosial dan budaya

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar terinklusi dalam misi pertama di atas, yaitu pembangunan infrastruktur menyeluruh.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar serta Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

Selain melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat sub bidang persampahan serta kesekretariatan;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat sub bidang persampahan;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat sub bidang persampahan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat sub bidang persampahan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup, kehutanan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat sub bidang persampahan;
- f. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas;
- g. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. JUMLAH PROGRAM NASIONAL YANG DILAKSANAKAN PERANGKAT DAERAH

Program Nasional (yang melekat di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) yang harus dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar tidak ada, namun sesuai yang telah tertuang dalam reviu RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023 dengan dasar Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dilaksanakan beberapa program sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (kehati)
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
10. Program Pengelolaan Persampahan

D. STANDARD OPERASIONAL PROCEDURE (SOP) PERANGKAT DAERAH

Standard Operasional Procedure (SOP) yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar sejumlah 69 SOP kegiatan terdiri atas 46 kegiatan administrasi rutin dan 23 kegiatan teknis, sebagai berikut :

SEKRETARIAT

A.SUB BAGIAN KEUANGAN

1. Pengajuan SPP UP /GU
2. Pengajuan SPP TU/LS
3. Laporan Keuangan
4. Pencairan Gaji
5. Pembayaran Ganti Uang (GU)

6. Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Disiplin Kerja
7. Pelaksanaan Verifikasi
8. Retribusi Jasa Penyedotan Kakus
9. Penyetoran Retribusi Jasa Penyedotan Kakus
10. Penerimaan Retribusi Pelayanan Sampah Rumah Tangga
11. Pembuatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA dan LRA SIPKD)
12. Pengajuan Rencana Kebutuhan Barang
13. Pengajuan Rencana Kebutuhan Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPMD)
14. Pelaporan Mutasi Barang
15. Pelaporan Pemeliharaan Barang
16. Pengajuan Penghapusan Barang
17. Serah Terima Barang
18. Peminjaman Barang

B. SUB BAGIAN PERENCANAAN

19. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)
20. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)
21. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
22. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)
23. Penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)
24. Pembentukan Tim Berdasarkan SK Kepala Dinas
25. Penyelenggaraan Rapat Tim Kegiatan
26. Penyusunan Laporan Realisasi Kinerja Bulanan
27. Penyusunan Laporan Tahunan (LPPD, LKPJ, LAKIP)
28. Pembuatan Laporan Pelaksanaan Kegiatan

C. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

29. Penanganan Surat Masuk
30. Pembuatan Surat Keluar
31. Pembuatan Surat Pengantar
32. Pengumpulan Bahan
33. Pembuatan Nota Dinas

- 34. Penerbitan SK Tim Kegiatan
- 35. Pelaksanaan Rapat Staf
- 36. Penerbitan Surat Tugas Perjalanan Dinas
- 37. Pembuatan Rekapitulasi Kehadiran Pegawai
- 38. Pemberian Nilai Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
- 39. Pemberian Izin Cuti Pegawai
- 40. Pengumpulan Bahan Usulan Kenaikan Pangkat
- 41. Pembuatan Bezetting PNS
- 42. Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK)
- 43. Pendistribusian Alat Tulis Kantor (ATK)
- 44. Peminjaman Buku Pustaka
- 45. Penyusunan SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah)
- 46. Penyusunan ANJAB (Analisis Jabatan)

BIDANG P4LH (Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

- 47. Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Berpotensi Mencemari Lingkungan
- 48. Pelayanan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)
- 49. Pelayanan Penerbitan Persetujuan Lingkungan
- 50. Pelayanan pada P3SLH (Pos Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup)

BIDANG P2KLH (Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup)

- 51. Penerbitan Persetujuan Teknis Pembuangan Udara Emisi
- 52. Penerbitan Persetujuan Teknis Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah
- 53. Pengambilan Sampel Air Limbah

54. Permintaan Pengambilan Contoh Uji dan/atau Penerimaan Contoh Uji Laboratorium Lingkungan

55. Program Kampung Iklim

56. Inventarisasi Gas Rumah Kaca

BIDANG PSLPK (Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pengembangan Kapasitas)

57. Pemeliharaan Kendaraan Operasional

58. Pengangkutan dan Pembuangan Sampah dari TPS ke TPA

59. Pelaporan Adipura

60. Pembinaan Sekolah Adiwiyata

61. Bank Sampah

62. Pemrosesan Sampah di TPA

63. Pelayanan Persampahan / Kebersihan

64. Pelayanan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3

65. Pelayanan Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten / Kota

E. PERDA/PERBUP YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar dan Peraturan Bupati Karanganyar, sebagai berikut :

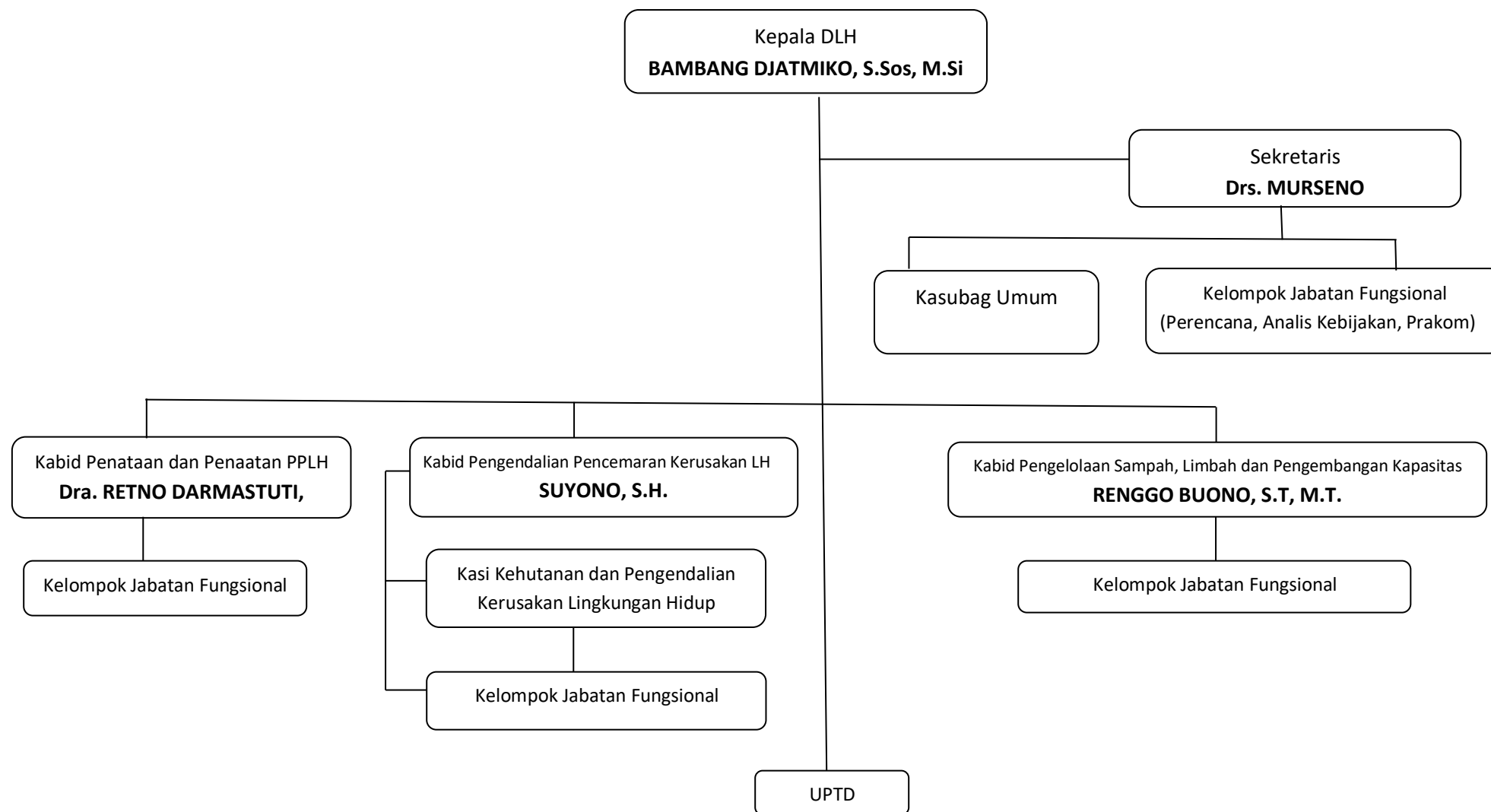
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 8);

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 16);
- c. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 91);
- d. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 89).

F. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup. Adapun Bagan Struktur Organisasi sebagaimana terlampir pada Gambar 1.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020**



G. KEPEGAWAIAN

Susunan kepegawaian yang dimaksudkan adalah kondisi sumber daya manusia aparatur yang ditempatkan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Karanganyar merupakan faktor penentu keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian tujuan sasaran dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Berikut rincian Daftar Pegawai dan Pejabat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 beserta dengan keterangannya.

1. DAFTAR PEGAWAI DLH

Menurut tingkat pendidikan untuk PNS dan Tenaga Harian Lepas

No	Pendidikan	Golongan					Jumlah
		Kontrak/ Honorar	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SD	13	-	-	-	-	13
2	SLTP	28	-	-	-	-	28
3	SLTA	57	22	21	-	-	100
4	D3	8	-	1	2	-	11
5	S1	22	-	1	22	2	47
6	S2	1	-	-	-	11	12
7	S3	-	-	-	-	-	0
8	Tidak sekolah	5	-	-	-	-	5
	JUMLAH	134	22	23	24	13	216

Keterangan : Data Subbag Umum, Desember 2022

Daftar PNS Dinas Lingkungan Hidup Kab.Karanganyar Tahun 2022

NO	NAMA PNS	NIP	GOL	TMT PANGKAT	JABATAN	TMT JABATAN	PEND. TERAKHIR
1	Bambang Djatmiko, S.Sos., M.Si	19711223 199003 1 001	IVc	01-Apr-21	Kepala Dinas	13-Jul-20	S2
2	Drs. Murseno	19660102 199302 1 001	IVb	01-Okt-19	Sekretaris	03-Jan-20	S1
3	Dra. Retno Darmastuti, MM	19650323 199203 2 012	IVa	01-Apr-10	Kabid Penataan dan Penataan PPLH	10-Apr-17	S2
4	Hafidl Ashfahamy H, SP,MM	19680507 199503 1 004	IVa	01-Okt-12	JF Pedal Ahli Muda	29-Dec-16	S2
5	Ir. Masdari,MM	19660706 199803 1 002	IVa	01-Apr-14	Kasi Kehutanan & Pengendalian Kerusakan LH	29-Dec-16	S2
6	Renggo Buono, S.T., M.T.	19751112 200312 1 003	IVa	01-Okt-15	Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah dan PK	06-Jan-20	S2
7	Abdurrozzaq A.N.,ST,MM	19740617 200312 1 002	IVa	01-Apr-20	JF Pedal Ahli Muda	29-Dec-16	S1
8	Tri Hendro Wibowo,ST,MM	19740509 200312 1 005	IVa	01-Apr-20	JF Pedal Ahli Muda	03-Jun-20	S2
9	Muhammad Zaenal Arifin, ST,MM	19720720 200312 1 004	IVa	01-Apr-20	JF Pengawas Ahli Muda	13-Jul-20	S2
10	Suyono, SH	19650521 199103 1 009	IVa	01-Okt-21	Kabid Pengendalian Pencemaran Kerusakan	13-Jul-20	S1
11	Giri Haryaji,SIP	19730106 199803 1 002	IIId	01-Okt-11	Kasubag umum	06-Jan-20	S1
12	Ida Tanti Nurani,SP	19710813 199603 2 006	IIId	01-Apr-13	Pengadministrasi Umum	01-Apr-20	S1
13	Dwi Paniti Marheni, SE	19640509 199003 2 005	IIId	01-Apr-13	Analisis data dan informasi	14-Nov-18	S1
14	Yunita Hatmi C, ST	19770608 200312 2 009	IIId	01-Apr-16	Analisis Lingkungan Hidup	14-Nov-18	S1
15	Maryanto, ST,MM	19660904 199302 1 001	IIId	01-Apr-18	JF Teknik Penyehatan Lingkungan Muda	29-Dec-16	S2
16	Paryadi,SE,MM	19720413 199503 1 002	IIId	01-Apr-18	JF Analisis Kebijakan Ahli Muda	06-Jan-20	S2
17	Etik Yulastuti, ST,M.Si	19810717 200604 2 016	IIId	01-Apr-18	JF Teknik Penyehatan Lingkungan Muda	06-Jan-20	S2
18	Surono, ST	19760114 200902 1 002	IIId	01-Apr-21	JF Pengawas Ahli Muda	29-Jun-21	S1
19	M. Kristantri, ST	19840308 200902 2 003	IIId	01-Apr-21	JF Perencana Ahli Muda	29-Jun-21	S1
20	Masrur,ST	19780821 201001 1 016	IIId	01-Apr-18	JF Pedal Ahli Muda	18-Mar-19	S1
21	Winarni,ST	19810124 201001 2 015	IIId	01-Apr-18	JF Pedal Ahli Muda	18-Mar-19	S1
22	Ike Hesti Karuniasari, ST	19810623 201001 2 022	IIId	01-Apr-18	JF Pedal Ahli Muda	29-Jun-21	S1

23	Purwoto,SE	19811229 201001 1 015	IIIc	01-Apr-18	Penata laporan Keuangan	01-Apr-20	S1
24	Taufiq Ahmadi,ST	19830621 201001 1 033	IIIc	01-Apr-18	JF Pedal Ahli Muda	18-Mar-19	S1
25	Wiwit Yuliyati, SKM	19840526 201101 2 007	IIIc	01-Okt-21	JF Pedal Ahli Muda	01-Okt-21	S1
26	Putri Suryani Handayani, S.Si	19821023 201101 2 011	IIIb	01-Apr-15	JF Pedal Ahli Pertama	18-Mar-19	S1
27	Pratomo Sugiharto, ST	19830819 201101 1 006	IIIb	01-Apr-15	JF Pedal Ahli Pertama	18-Mar-19	S1
28	Bayu Eko Prabowo, ST	19831231 201101 1 012	IIIb	01-Apr-15	JF Pedal Ahli Pertama	18-Mar-19	S1
29	Indri Astati Latifah H, S.Si	19850910 201101 2 012	IIIb	01-Apr-15	JF Pedal Ahli Pertama	18-Mar-19	S1
30	Siti Dariyah, S.Kom	19870910 201101 2 005	IIIb	01-Apr-18	Bendahara	14-Nov-18	S1
31	Roni Sugeng Nurrokhman, ST	19810625 200604 1 001	IIIb	01-Okt-18	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	14-Nov-18	S1
32	Agung Herman Utomo, SH	19751226 201406 1 001	IIIb	01-Okt-18	Pengelola sarana prasarana kantor	31-Dec-18	S1
33	Eko Nugroho, ST	19830308 201101 1 013	IIIb	01-Apr-20	Pengendali Dampak Lingkungan Pertama	02-Agu-19	S1
34	Baseno Anwar, AMKL	19761208 201001 1 008	IIIa	01-Okt-18	Analisis Pengamanan Lingkungan	08-Jun-20	D3
35	Aris Nurhidayah, ST	19920720 201903 2 018	IIIa	01-Mar-19	Analisis Lingkungan Hidup	15-Feb-21	S1
36	Latifah Hajar, ST	19931001 201903 2 020	IIIa	01-Mar-19	Analisis Lingkungan Hidup	15-Feb-21	S1
37	Asti Wida Triyana, A.Md	19921030 201402 2 001	IId	01-Apr-18	Analisis konservasi air dan lingkungan hidup	15-Feb-21	D3
38	Sutaryo, SE	19700919 200701 1 029	IId	01-Apr-19	Penata laporan Keuangan	14-Nov-18	SMA
39	Rukiyo	19690716 200701 1 044	IId	01-Apr-19	Pramu kebersihan	14-Nov-18	SMA
40	Ruslan Sukarno	19711028 200701 1 005	IId	01-Apr-19	Pengemudi	14-Nov-18	SMA
41	Suparno	19711106 200701 1 012	IId	01-Apr-19	Pramu kebersihan	14-Nov-18	SMA
42	Agus Sugeng Widodo	19680825 200801 1 013	IId	01-Apr-20	Pengemudi	14-Nov-18	SMA
43	Sukasno	19640415 201001 1 002	IId	01-Apr-18	Pramu kebersihan	14-Nov-18	SMA
44	Sumarso	19681208 201001 1 001	IId	01-Apr-18	Pramu kebersihan	14-Nov-18	SMA
45	Joko Prasetyo	19780501 201001 1 003	IId	01-Apr-18	Pengelola sampah	14-Nov-18	SMA
46	Sumali	19810107 201001 1 002	IId	01-Apr-18	Pengelola Limbah	14-Nov-18	SMA
47	Deny Aryanto	19830110 201001 1 003	IId	01-Apr-18	Pengemudi	14-Nov-18	SMA

48	Sawaldo Joko Darsono	19701202 201212 1 001	Ilc	01-Apr-21	Pramu kebersihan	14-Nov-18	SMA
49	Subarno	19671011 201212 1 001	Ilc	01-Apr-21	Pramu kebersihan	14-Nov-18	SMA
50	Sutini	19680301 201212 2 001	Ilc	01-Apr-21	Pramu kebersihan	14-Nov-18	SMA
51	Saryono	19680304 201212 1 001	Ilc	01-Apr-21	Pramu kebersihan	14-Nov-18	SMA
52	Supar Sutrisno	19720529 200902 1 001	Ilb	01-Apr-21	Pramu kebersihan	03-Jan-17	SMA
53	Sutiman	19690909 201001 1 005	Ila	01-Apr-18	Pramu kebersihan	03-Jan-17	SMA
54	Sutar	19790604 201001 1 002	Ila	01-Apr-18	Pramu kebersihan	03-Jan-17	SMA
55	Sutoyo	19800423 201001 1 001	Ila	01-Apr-18	Pramu kebersihan	03-Jan-17	SMA
56	Sunar	19800612 201001 1 006	Ila	01-Apr-18	Pramu Kebersihan	15-Feb-21	SMA
57	Maryono	19810514 201001 1 004	Ila	01-Apr-18	Pramu kebersihan	03-Jan-17	SMA
58	Bambang Siswanto	19680414 201001 1 004	Ila	01-Apr-18	Petugas Keamanan	22-Feb-17	SMA
59	Ngadiyo	19720213 201001 1 003	Ila	01-Apr-18	Pengemudi	03-Jan-17	SMA
60	Sumidi	19740605 201001 1 010	Ila	01-Apr-20	Pramu Bakti	01-okt-21	SMA
61	Warjiyem	19670909 201212 2 001	Ila	01-Apr-21	Pramu Kebersihan	01-okt-21	SMA
62	Suratmin	19650715 200604 1 010	Id	01-Apr-18	Petugas Keamanan	01-okt-21	SMA
63	Toyib	19701101 200701 1 017	Id	01-Apr-19	Pengemudi	01-okt-21	SMA
64	Sutarno	19631221 200902 1 001	Id	01-Apr-21	Pengemudi	01-okt-21	SMA
65	Giyanto	19721128 200902 1 002	Ic	01-Okt-21	Pengemudi	01-okt-21	SMA
66	Suwardi	19650904 201001 1 001	Ic	01-Apr-18	Pengemudi	01-okt-21	SMA
67	Mukidi	19680823 201001 1 002	Ic	01-Apr-18	Pengemudi	01-okt-21	SMA
68	Sunarto	19690128 201001 1 001	Ic	01-Apr-18	Pengemudi	01-okt-21	SMA
69	Suroto	19731108 201001 1 002	Ic	01-Apr-18	Pramu Kebersihan	01-okt-21	SMA
70	Suratno	19761227 201001 1 001	Ic	01-Apr-18	Pramu Kebersihan	01-okt-21	SMA
71	Suyanto	19761229 201001 1 001	Ic	01-Apr-18	Pramu Kebersihan	01-okt-21	SMA
72	Sukirno Adi Saputro	19780810 201001 1 002	Ic	01-Apr-18	Pramu Kebersihan	01-okt-21	SMA

73	Budiman	19790323 201001 1 002	lc	01-Apr-18	Pramu Kebersihan	01-okt-21	SMA
74	Wandiyo	19691106 201212 1 001	lc	01-Okt-21	Pramu Kebersihan	01-okt-21	SMA
75	Paimin	19650525 201212 1 001	lc	01-Okt-21	Pramu Kebersihan	01-okt-21	SMA
76	Sumiyem	19650818 201212 1 001	lc	01-Okt-21	Pramu Kebersihan	01-okt-21	SMA
77	Sukidi	19690122 201212 2 001	lc	01-Okt-21	Pramu Kebersihan	01-okt-21	SMA
78	Suroto	19710808 201212 1 002	lc	01-Okt-21	Pengemudi	01-okt-21	SMA
79	Giyatmi	19750208 201212 1 001	lc	01-Okt-21	Pramu Kebersihan	03-Jan-17	SMA
80	Sumarsi	19760905 201212 2 001	lc	01-Apr-21	Pramu Kebersihan	01-okt-21	SMA
81	Tri Suyamto	19680711 201212 2 001	lc	01-Okt-21	Pengemudi	01-okt-21	SMA
82	Sutardi	19701103 201212 1 003	lc	01-Okt-21	Pengemudi	01-okt-21	SMA
83	Sutarjo	19760913 201212 1 001	lc	01-Okt-21	Pramu Kebersihan	01-okt-21	SMA
84	Sutarna Suwarna	19810811 201212 1 001	ld	01-Okt-21	Pramu Kebersihan	01-okt-21	SMA

Keterangan : Data Subbag Umum, Desember 2022

2. DAFTAR PEJABAT STRUKTURAL DLH YANG TERISI

NO	NAMA	JABATAN STRUKTURAL	MEMENUHI PERSYARATAN DIKLATPIM	MEMENUHI SYARAT KEPANGKATAN
1	Bambang Djatmiko, S.Sos., M.Si.	Kepala Dinas	Telah diklatpim	Memenuhi
2	Drs. Murseno	Sekretaris	Telah diklatpim	Memenuhi
3	Dra. Retno Darmastuti, M.M.	Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Telah diklatpim	Memenuhi
4	Suyono, S.H.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup	Memenuhi syarat Diklatpim	Memenuhi
5	Renggo Buono, S.T., M.T.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pengembangan Kapasitas	Telah diklatpim	Memenuhi
6	Giri Haryaji, S.IP	Kasubbag Umum	Memenuhi syarat Diklatpim	Memenuhi
7	Ir. Masdari, M.M	Kepala Seksi Kehutanan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup	Memenuhi syarat Diklatpim	Memenuhi

3. DAFTAR PEJABAT STRUKTURAL DLH YANG BELUM TERISI

NO	JABATAN STRUKTURAL	ESELON
	N I H I L	

4. DAFTAR PEJABAT FUNGSIONAL DLH (khusus/tertentu)

NO	NAMA	NIP	NAMA JABATAN FUNGSIONAL
1	Hafidl A.H., S.P, M.M	19680507 199503 1 004	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda
2	Abdurrozzaq A.N, S.T, M.M	19740617 200312 1 002	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda
3	Tri Hendro W, S.T,M.M	19740509 200312 1 005	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda
4	Ike Hesti Karuniasari, S.T.	19810623 201001 2 022	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda
5	Masrur, S.T.	19780821 201001 1 016	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda
6	Winarni, S.T.	19810124 201001 2 015	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda
7	Taufiq Ahmadi, S.T.	19830621 201001 1 033	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda
8	Putri Suryani Handayani, S.Si	19821023 201101 2 011	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama
9	Pratomo Sugiharto, S.T.	19830819 201101 1 006	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama
10	Bayu Eko Prabowo, S.T.	19831231 201101 1 012	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama
11	Indri Astaty Latifa Hafidhah, S.Si	19850910 201101 2 012	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama

12	Wiwit Yuliyati, S.K.M	19840526 201101 2 007	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama
13	Eko Nugroho, S.T.	19830308 201101 1 013	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama
14	M. Zaenal Arifin,S.P, M.M	19720720 200312 1 004	Pengawas Ahli Muda
15	Surono, S.T.	19760114 200902 1 002	Pengawas Ahli Muda
16	Maryanto, S.T.	19660904 199302 1 001	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda
17	Etik Yuliasuti, S.T, M.Si	19810717 200604 2 016	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda
18	M.Kristantri, S.T.	19840308 200902 2 003	Perencana Ahli Muda
19	Paryadi, S.T, M.M.	19720413 199503 1 002	Analisis Kebijakan Ahli Muda

5. DAFTAR PEJABAT FUNGSIONAL DLH YANG BELUM TERISI
(khusus/tertentu)

NO	NAMA	NIP	NAMA JABATAN FUNGSIONAL

N I H I L

BAB III

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Nihil

B. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

1. Lingkungan Hidup

No	IKK Output dan Capaian Kinerja		IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja
1	1.	Hasil perhitungan provinsi terhadap: a. Indeks kualitas air (IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks tutupan hutan (ITH)	56,71 - Ket.: IKA (Indeks Kualitas Air) = 56,71 IKU (Indeks Kualitas Udara) = 80,71 IKL (Indeks Kualitas Lahan) = 63,33	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten/ kota	67,88 Ket. : = (0,376 x Indeks Kualitas Air) + (0,405 x Indeks Kualitas Udara) + (0,219 x Indeks Kualitas Lahan) = (0,376 x 56,71) + (0,405 x 80,71) + (0,219 x 63,33) = 21,32 +

						32,69 + 13,87 = 67,88
2	2.	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/ kota	1,00 dokumen Ket.: Dokumen Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 15 Tahun 2021 tentang Jakstrada Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/ kota	Total volume sampah yang dapat ditangani ----- x 100% Total volume timbunan sampah kabupaten/ kota	Pembilang = 1135653.00 m3 Penyebut = 1182965.00 m3 Hasil = 96,00
3	1.	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota	100,00 persen Ket.: Izin lingkungan sesuai PP	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten/ Kota ----- x 100% Usaha dan/atau kegiatan	Pembilang = 13.00 U/K Penyebut = 60.00 U/K Hasil = 21,67

		No.5 Tahun 2021 telah berubah menjadi Peraturan Setujuan Lingkungan berupa SPPL, Peraturan Setujuan PKPLH terbit dan terintegrasi pada OSS sejumlah 1.704 dan terbit otomatis dari OSS, sehingga capaian 100 persen	dilakukan pemeriksaan	
2.	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/ kota	0,12 persen Ket.: Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup pada DLH Kab.Karan		

		ganyar sebanyak 2 orang, yaitu M. Zaenal Arifin, ST, MM dan Surono, S.T			
3.	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota	0,00 Ket.: Kab.Karan ganyar tidak mem punyai Ma syarakat Hukum Adat			
4.	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	0,00 persen Ket.: Kab.Karan ganyar tidak ada penetapan MHA			
5.	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi	100,00 persen Ket.: (27 aduan yang			

	usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/ kota yang ditangani	masuk dibagi 27 aduan yang ditindaklanjuti) kali 100%			
--	--	---	--	--	--

C. URUSAN PILIHAN

1. Kehutanan

No	IKK Output dan Capaian Kinerja		IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja
1	1.	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	0,00 dokumen Ket.: Kehutanan merupakan kewenangan Provinsi, sehingga DLH Kab. Karanganyar tidak mengelola Tahura		0,00 Ket. : Kehutanan bukan merupakan kewenangan Provinsi
	2.	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	0,00 Ket.: Kehutanan merupakan kewenangan		

		Provinsi Jawa Tengah			
3.	Pemulihan ekosistem pada Tahura	0,00 Ket.: Kehutanan menjadi ke wenangan provinsi, sehingga DLH Kab. Karangany ar tidak melakukan Pemulihan ekosistem pada Tahura			
4.	Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	0,00 Ket.: Kehutanan merupaka n kewenan gan provinsi			

D. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

Nihil

BAB IV

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

	URUSAN PEMERINTAHAN	KBJK STRA.	PROGRAM DAN KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		a PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Anggaran: Rp. 12.000.000,00 Realisasi: Rp. 11.592.968,00 Persentase: (96,61%)	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun 2 dokumen	2 dokumen (100.00%)		
				2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Anggaran: Rp. 1.500.000,00 Realisasi: Rp. 1.500.000,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah RKA yang tersusun 1 dokumen	1 dokumen (100.00%)		
				3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	Jumlah Perubahan	1 dokumen		

				SKPD Anggaran: Rp. 2.500.000,00 Realisasi: Rp. 2.499.900,00 Persentase: (100,00%)	RKA yang tersusun 1 dokumen	(100.00%)		
				4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Anggaran: Rp. 2.500.000,00 Realisasi: Rp. 2.500.000,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah DPA yang tersusun 1 dokumen	1 dokumen (100.00%)		
				5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Anggaran: Rp. 3.000.000,00 Realisasi: Rp. 2.999.900,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah Perubahan DPA yang tersusun 1 dokumen	1 dokumen (100.00%)		
				6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Anggaran: Rp. 7.000.000,00 Realisasi: Rp. 6.740.550,00 Persentase: (96,29%)	Jumlah laporan capaian kinerja tersusun 3 dokumen	3 dokumen (100.00%)		

				7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Anggaran: Rp. 6.500.000,00 Realisasi: Rp. 6.429.000,00 Persentase: (98,91%)	Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan 12 bulan	12 bulan (100.00%)		
			b PROGRAM . PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Anggaran: Rp. 7.477.656.000,00 Realisasi: Rp. 6.962.841.008,00 Persentase: (93,12%)	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN 12 bulan	12 bulan (100.00%)		
				2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Anggaran: Rp. 146.965.100,00 Realisasi: Rp. 146.965.100,00 Persentase: (100,00%)	Prosentase kelancaran pengelolaan keuangan perangkat daerah 100 persen	100 persen (100.00%)		
				3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Anggaran: Rp. 5.000.000,00	Jumlah laporan keuangan akhir tahun 3 eksemplar	3 eksemplar (100.00%)		

				Realisasi: Rp. 5.000.000,00 Persentase: (100,00%)				
				4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD Anggaran: Rp. 17.480.000,00 Realisasi: Rp. 17.461.000,00 Persentase: (99,89%)	Jumlah laporan capaian program kegiatan dan anggaran 18 laporan	18 laporan (100.00%)		
			c PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Anggaran: Rp. 20.000.000,00 Realisasi: Rp. 17.177.936,00 Persentase: (85,89%)	Jumlah diklat pegawai 5 diklat	5 diklat (100.00%)		
			d PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, Kegiatan Administrasi Umum	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Anggaran: Rp. 3.000.000,00 Realisasi: Rp. 2.995.000,00 Persentase: (99,83%)	Jumlah pengadaan alat-alat listrik 14 komponen	14 komponen (100.00%)		

			Perangkat Daerah					
				2) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Anggaran: Rp. 9.000.000,00 Realisasi: Rp. 8.811.500,00 Persentase: (97,91%)	Jumlah kegiatan updating website dan medsos resmi 12 bulan	12 bulan (100.00%)		
				3) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Anggaran: Rp. 126.381.000,00 Realisasi: Rp. 125.662.800,00 Persentase: (99,43%)	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 70 jenis	70 jenis (100.00%)		
				4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Anggaran: Rp. 19.775.000,00 Realisasi: Rp. 19.774.500,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah kegiatan penggandaan dokumen/surat 3 kegiatan	3 kegiatan (100.00%)		
				5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Anggaran: Rp. 3.030.000,00 Realisasi:	Penyediaan bahan bacaan berupa surat kabar 2 jenis 1 tahun	1 tahun (100.00%)		

				Rp. 3.030.000,00 Persentase: (100,00%)				
				6) Fasilitas Kunjungan Tamu Anggaran: Rp. 5.625.000,00 Realisasi: Rp. 3.030.000,00 Persentase: (53,87%)	Jumlah kegiatan pelayanan tamu 12 bulan	12 bulan (100.00%)		
				7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Anggaran: Rp. 96.400.000,00 Realisasi: Rp. 96.400.000,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi 12 bulan	12 bulan (100.00%)		
			e PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat Anggaran: Rp. 3.000.000,00 Realisasi: Rp. 3.000.000,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah kegiatan surat menyurat 12 bulan	12 bulan (100.00%)		
				2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Jumlah pajak bumi dan	12 bulan (100.00%)		

				Air dan Listrik Anggaran: Rp. 173.480.000,00 Realisasi: Rp. 170.308.022,00 Persentase: (98,17%)	bangunan 15) lokasi yang terbayar serta jumlah pajak 6 jaringan listrik, 3 jaringan telp/fax, 3 jaringan air yang terbayar 12 bulan		
				3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Anggaran: Rp. 20.000.000,00 Realisasi: Rp. 20.000.000,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara 8 jenis	8 jenis (100.00%)	
				4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Anggaran: Rp. 6.500.000,00 Realisasi: Rp. 6.380.000,00 Persentase: (98,15%)	Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia 22 jenis, serta retribusi sampah terbayarkan 12 bulan	12 bulan (100.00%)	
		f. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara 10 kendaraan	12 bulan (100.00%)		

			DAERAH, Kegiatan Pe meliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem erintahan Daerah	Dinas Jabatan Anggaran: Rp. 141.394.500,00 Realisasi: Rp. 140.997.838,00 Persentase: (99,72%)	dan jumlah pajak 7 kendaraan roda empat, 4 kendaraan roda dua 12 bulan			
				2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Anggaran: Rp. 32.100.000,00 Realisasi: Rp. 27.933.800,00 Persentase: (87,02%)	Jumlah jasa uji KIR 23 kendaraan yang terlaksana dan jumlah pajak 8 kendaraan roda tiga, 18 truck, 5 kendaraan roda empat yang terbayar 12 bulan	12 bulan (100.00%)		
				3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Anggaran: Rp. 48.454.900,00 Realisasi: Rp. 48.454.900,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor 5 kegiatan	5 kegiatan (100.00%)		

B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

	URUSAN PEMERINTAHAN	KBJK STRUKTURAL	PROGRAM DAN KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		a PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH, Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Anggaran: Rp. 65.661.100,00 Realisasi: Rp. 65.661.100,00 Persentase: (100,00%)	Operasional dan pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPLT Kaliboto) 1 Unit	1 Unit (100.00%)		
				2) Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja Anggaran: Rp. 104.323.900,00 Realisasi: Rp. 104.298.400,00 Persentase: (99,98%)	Prosentase Tindak Lanjut Pelayanan Sedot Tinja 100 %	100 % (100.00%)		

C. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

	URUSAN PEMERINTAHAN	KBJK STRUKTURAL	PROGRAM DAN KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
--	---------------------	-----------------	----------------------	---------------------	--------	-----------	--------------	------------------------------

1	LINGKUNGAN HIDUP	a	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP, Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	1) Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota Anggaran: Rp. 30.850.000,00 Realisasi: Rp. 30.814.800,00 Persentase: (99,89%)	Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota ditindaklanjuti 100 %	100 % (100.00%)		
		b	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN, Kegiatan Pengelolaan Sampah	1) Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali Anggaran: Rp. 30.000.000,00 Realisasi: Rp. 29.784.300,00 Persentase: (99,28%)	Kegiatan pembinaan dan pembentukan Bank Sampah di masyarakat dan instansi/dinas /BUMD 6 bank sampah	6 bank sampah (100.00%)		
				2) Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan,	Pemeliharaan sarana prasarana TPA dan	12 bulan (100.00%)		

				dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Anggaran: Rp. 4.396.836.600,00 Realisasi: Rp. 4.320.472.673,00 Persentase: (98,26%)	operasional persampahan 12 bulan			
				3) Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Anggaran: Rp. 125.000.000,00 Realisasi: Rp. 118.241.300,00 Persentase: (94,59%)	Terlaksananya sosialisasi Program Pengelolaan Sampah Kepada Masyarakat di Kabupaten Karanganyar 4 kegiatan	4 kegiatan (100.00%)		
				4) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Anggaran: Rp. 85.920.000,00 Realisasi: Rp. 84.761.100,00 Persentase: (98,65%)	terlaksananya studi komparatif pengelolaan persampahan 1 kegiatan	1 kegiatan (100.00%)		
				5) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Terpenuhinya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	1 paket (100.00%)		

				Anggaran: Rp. 295.000.000,00 Realisasi: Rp. 276.392.400,00 Persentase: (93,69%)	di TPA/TPST/ SPA 1 paket			
			c PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP, Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	1) Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota Anggaran: Rp. 155.000.000,00 Realisasi: Rp. 153.664.300,00 Persentase: (99,14%)	Tersusunnya Dokumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (D3TLH) 1 dokumen	1 dokumen (100.00%)		
			d PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP, Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	1) Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup Anggaran: Rp. 57.585.000,00 Realisasi: Rp. 57.350.620,00 Persentase: (99,59%)	Jumlah dokumen IKLH dan IKPLHD 2 dokumen	2 dokumen (100.00%)		

			e PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP, Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut Anggaran: Rp. 42.000.000,00 Realisasi: Rp. 41.911.109,00 Persentase: (99,79%)	Diterbitkannya persetujuan teknis 10 persetujuan teknis	10 persentase persetujuan teknis (100.00%)		
				2) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Anggaran: Rp. 80.000.000,00 Realisasi: Rp. 79.790.000,00 Persentase: (99,74%)	Terbentuknya Kampung Iklim di Kabupaten Karanganyar 10 lokasi	10 lokasi (100.00%)		
				3) Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Anggaran: Rp. 590.000.000,00 Realisasi:	Jumlah kegiatan pengadaan dan pemeliharaan alat dan	2 kegiatan (100.00%)		

				Rp. 554.855.250,00 Persentase: (94,04%)	bahan lab 2 kegiatan			
			f. PROGRAM PENGENDA LIAN PENC EMARAN DAN/ATAU KERUSAKA N LINGKUN GAN HIDUP, Kegiatan Pe nanggulang an Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabu paten/Kota	1) Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Anggaran: Rp. 54.840.000,00 Realisasi: Rp. 54.264.000,00 Persentase: (98,95%)	capacity building bagi pemerhati lingkungan 1 kegiatan	1 kegiatan (100.00%)		
			g. PROGRAM PENGENDA LIAN PENC EMARAN DAN/ATAU KERUSAKA N LINGKUN GAN HIDUP, Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau	1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi Anggaran: Rp. 72.695.000,00 Realisasi: Rp. 71.152.000,00 Persentase: (97,88%)	Jumlah bibit tanaman untuk rehabilitasi lingkungan 880 bibit	880 bibit (100.00%)		

			Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					
			h. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI), Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	1) Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan Anggaran: Rp. 47.465.000,00 Realisasi: Rp. 46.955.000,00 Persentase: (98,93%)	jumlah bibit tanaman keanekaragaman hayati 1 paket	1 paket (100.00%)		
			i. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3), Kegiatan Penyimpanan Sementara	1) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Anggaran: Rp. 99.000.000,00 Realisasi: Rp. 94.727.350,00 Persentase: (95,68%)	Jumlah pemantauan dan pembinaan perusahaan penghasil LB3 25 kegiatan	25 kegiatan (100.00%)		

			Limbah B3				
				2) Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 Anggaran: Rp. 100.000.000,00 Realisasi: Rp. 98.362.000,00 Persentase: (98,36%)	Jumlah pemantauan dan pembinaan perusahaan penghasil LB3 20 kegiatan	20 kegiatan (100.00%)	
		j.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH), Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau	1) Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Anggaran: Rp. 57.415.000,00 Realisasi: Rp. 57.350.100,00 Persentase: (99,89%)	Jumlah persetujuan lingkungan yang terverifikasi 250 usaha/kegiatan	250 usaha/kegiatan (100.00%)	

			Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
				2) Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Anggaran: Rp. 61.981.500,00 Realisasi: Rp. 61.891.300,00 Persentase: (99,85%)	Jumlah pelaku usaha dan/ atau kegiatan yang diawasi/ dibina 60 usaha	60 usaha (100.00%)	
			k PROGRAM . PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT, Kegiatan Pe	1) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Anggaran: Rp. 16.500.000,00 Realisasi: Rp. 16.171.700,00 Persentase: (98,01%)	Terbinanya Kelompok/Organisasi/Lembaga Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup 2 kelompok	2 kelompok (100.00%)	

			nyelenggara an Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Ke masyarakata n Tingkat Daerah Kab upaten/Kota				
				2) Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Anggaran: Rp. 42.000.000,00 Realisasi: Rp. 41.774.700,00 Persentase: (99,46%)	Jumlah pendampingan sekolah adiwiyata 30 sekolah	30 sekolah (100.00%)	
				3) Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Anggaran: Rp. 170.000.000,00 Realisasi: Rp. 167.095.100,00 Persentase: (98,29%)	Telaksananya Kampanye Lingkungan Hidup pada Hari Lingkungan Melalui Baliho 1 Paket	1 Paket (100.00%)	
			I. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN	1) Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia	Terlaksananya kegiatan adipura 1 kegiatan	1 kegiatan (100.00%)	

			HIDUP UNTUK MA SYARAKAT, Kegiatan Pemberian Penghargaa n Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kab upaten/Kota	Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Anggaran: Rp. 31.387.400,00 Realisasi: Rp. 30.994.900,00 Persentase: (98,75%)				
--	--	--	---	--	--	--	--	--

D. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN*Nihil***E. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN***Nihil***F. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN***Nihil***G. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN***Nihil***H. UNSUR KEWILAYAHAN***Nihil***I. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM***Nihil***J. UNSUR KEKHUSUSAN***Nihil*

BAB V
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN
TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

V.1. TUGAS YANG DITERIMA DARI PEMERINTAH (PEMERINTAH PUSAT) YANG DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN

NIHIL

V.2. TUGAS YANG DITERIMA DARI PEMERINTAH PROVINSI YANG DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN

NIHIL

V.3. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN KEPADA DESA

NIHIL

BAB VI

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan tugas fungsi pada urusan lingkungan hidup yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga tidak ada Standar Pelayanan Minimal.